RENCANA STRATEGIS

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

2019 - 2024

Edisi I - 2019

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Drs. Warsito No. 76,Teluk Betung Utara
BANDAR LAMPUNG

Kata Pengantar

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada Tim Penyusun Renstra untuk menyelesaikan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024 ini.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku Renstra ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan serta isu strategis yang berkembang menjadikan penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024 baik pikiran, tenaga, dan waktu. Semoga dokumen ini bisa digunakan sebagai bahan kajian, informasi serta sebagai acuan kegiatan tahun yang akan datang

Bandar Lampung, 21 Desember 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST, MT.
NIP. 19730222 200312 1 010

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 6
2.2 Sumber Daya 15
2.3 Kinerja dan Pelayanan OPD 18
2.4 Kinerja dan Pelayanan OPD 19
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 35

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih ... 38
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 41
3.5 Telaahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 43
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis 47

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 49

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 51

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan 55

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 60

BAB VIII. PENUTUP

Penutup 62

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Potensi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung 16

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 16

Tabel 2.3 PDRB Kelompok Pertanian Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014 – 2018 19

Tabel 2.4 Distribusi PDRB Kelompok Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (%) 2014 – 2018 20

Tabel 2.5 Komposisi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB sektor Pertanian menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (%) 2014 – 2018 20

Tabel 2.6 Rumah Tangga Perikanan/ Perusahaan Perikanan (RTPP), 2014 – 2018 24

Tabel 2.7 Jumlah Pembudidaya Ikan di Provinsi Lampung (orang), 2014 – 2018 24

Tabel 2.8 Perkembangan NTP Umum dan subsektor penyusunnya, Januari 2015 – Februari 2019 26

Tabel 2.9 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan di Prov. Lampung, 2014-2018 28

Tabel 2.10 Jumlah Pokmaswas dan Anggota Pokmaswas berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi Lampung tahun 2018 28

Tabel 2.11 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2018. 29

Tabel 2.12 Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Lampung, 2018 30

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2015 - 2019 31

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 33

Tabel 4.1 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran ... 49

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan PD 50

Tabel 5.1 Analisis SWOT 53

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 54

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 60

Tabel 7.2 Cara perhitungan capaian indikator kinerja pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung 61

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung 9

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%), 2014 – 2018 21

Gambar 2.3 Produksi Perikanan Tangkap Prov. Lampung Thn 2014 – 2018 (ton) 22

Gambar 2.4 Produksi Perikanan Budidaya Prov. Lampung Thn 2014 – 2018 (ton) 23

Gambar 2.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung, 2017 - 2018 25

Gambar 2.6 Perkembangan NTP Umum, NTP Perikanan Tangkap (NTN) dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) Provinsi Lampung, Januari 2015 – Februari 2019 26

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Prov. Lampung (kg/kap/th) 33

Gambar 3.1 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum 44

Gambar 3.2 Peta Kawasan Konservasi 45

Gambar 3.3 Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu 46

Gambar 3.4 Peta Alur Laut 47

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengalihan kewenangan yang disertai dengan pengalihan sumber keuangan kepada pemerintahan daerah tentunya berimplikasi pula pada tanggung jawab yang besar bagi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Salah satu kunci keberhasilan dari proses pembangunan di daerah adalah proses perencanaan. Untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan, Pemerintah telah menetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya harus memenuhi asas perencanaan yang baik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki acuan, arahan dan sasaran yang jelas baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh OPD dan menjadi panduan arah kebijakan pembangunan adalah Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 maupun RPJMN Pemerintah Pusat yang sedapat mungkin selaras dan mendukung target-target nasional. Renstra OPD tersebut menjadi dasar dalam penentuan rencana kinerja tahunan termasuk target/indikator kinerja dan alokasi anggaran.

Pada September 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU nomor 32 Tahun 2004. Salah satu perubahan besar dalam UU Pemda yang baru adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, termasuk kewenangan dibidang kelautan dan pengawasan. Tindak lanjut dari pemberlakuan UU Pemda tersebut, Pemerintah Daerah menyusun Perda terkait Organisasi Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. Pemerintah Provinsi menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung yang dilengkapi dengan Pergub Nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 80 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok, yaitu :

1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan deradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;

8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi sebagaimana Pergub Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
   1) Seksi Tata Ruang,
   2) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
   3) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
   1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
   2) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan
   3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi :
   1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
   2) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan; dan
   3) Seksi Penguatan Daya Saing.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
   1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
   2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
   3) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum

7. Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD)terdiri dari :
   1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
   2) UPTD Perbenihan Ikan Kelas A;
   3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
   4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A;
   5) UPTD Pelabuhan Perikan Kota Agung Kelas A;
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya

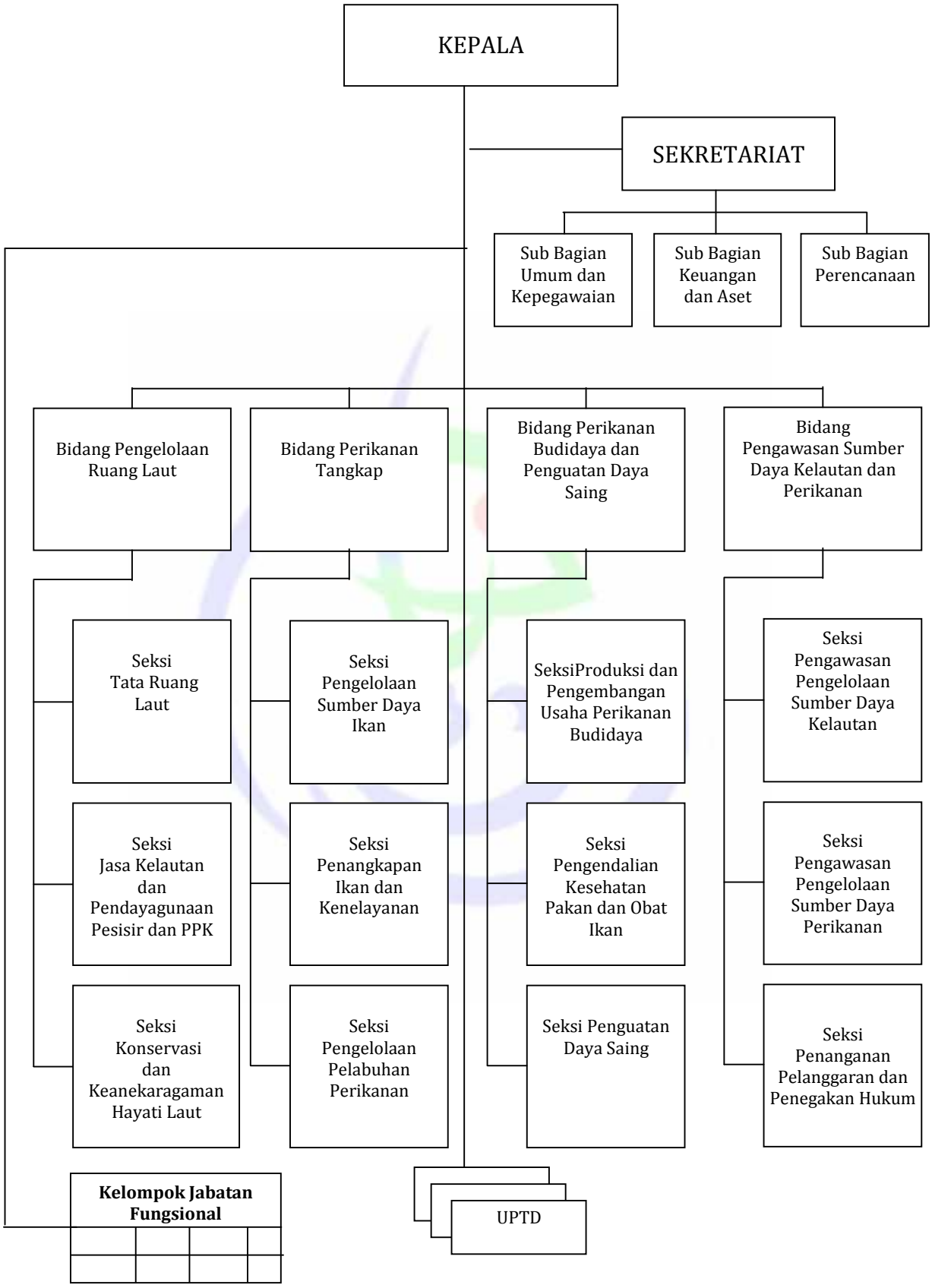

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu :

1. Kepala Dinas
   a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
   b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
      a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapanlokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
      b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin,dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
      c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan

penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan tehnis administrasi umum, organisasi, tata laksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, tata laksana, perlengkapan dan peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

a) Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati.

b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. pelaksaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
d. Membentuk unit layanan pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur
e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan ruang laut; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

a) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, kenelayanan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan, penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (Lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap;
b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring perikanan tangkap;
d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing,

a) Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

budidaya perikanan dan penguatan daya saing, produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring di perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelanjutan dan perikanan;
d. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, industrialisasi pengolahan perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,

a) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumberdaya kelauta dan perikanan;
c. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan operasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
e. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan;
f. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan IUU-Fishing dan Destructive Fishing
g. membentuk dan membina gugus tugas lapangan dengan melibatkan unsur dinas perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi
h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
   a) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
   b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, UPTD mempunyai fungsi:
      a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
      b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
      c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

Jenis pelayanan yang menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sesuai amanat Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu :

a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;

c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
e. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
g. pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
h. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
j. pelayanan administratif

Adapun kelompok sasaran yang menjadi tanggungjawab pelayanan DKP Provinsi Lampung adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dunia usaha perikanan, LSM, dan kelompok stakeholder lainnya.

2.2 SUMBERDAYA

2.2.1 SUMBERDAYA ALAM

Provinsi Lampung memiliki luas total wilayah 60.200,9km^2, dengan luas areal daratan seluas 35.376,5 km^2 atau 58,8% dan perairan laut (12 mil) seluas 24.820 km^2 atau 41,2%. Provinsi Lampung memiliki daerah pesisir seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 950 km. Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil dan memiliki 2 (dua) teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Potensi alam lainnya adalah 6 (enam) sungai besar, yaitu :

- Way Sekampung: 256 km
- Way Semangka: 90 km
- Way Seputih: 190 km
- Way Jepara: 50 km
- Way Tulang Bawang: 136 km
- Way Mesuji: 220 km

Sehingga luas daerah tangkapan perairan air tawar di seluruh Provinsi Lampung adalah seluas 17.807 km^2.

Gambaran cakupan pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota, seperti pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Potensi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir	Panjang Pantai (km)
1	Lampung Selatan	41	26	247,76
2	Bandar Lampung	2	26	27,01
3	Lampung Timur	5	17	108
4	Pesawaran	38	18	96
5	Lampung Tengah (Perairan Sungai/Muara)	-	9	-
6	Pesisir Barat	3	99	210
7	Tulang Bawang		22	51,9
8	Tanggamus	43	46	210
	Jumlah	132	263	950,67

Sumber : Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K

Dilihat pada tabel di atas, Kabupaten Tanggamus memiliki pulau terbanyak yaitu 43 buah dengan 46 desa pesisir. Sedangkan Lampung Selatan memiliki garis panjang pantai terpanjang yaitu 247,76 km.

2.2.2 SUMBERDAYA APARATUR

Jumlah pegawai pada Semester I tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 141 orang dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

No	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Jumlah
a.	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	1. Laki-laki	89
	2. Perempuan	52
b.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	1. Pasca Sarjana (S3)	1
	2. Pasca Sarjana (S2)	38
	3. Sarjana (S1)	47
	4. D IV	4
	5. D III/Sarjana Muda	8
	6. SLTA Sederajat	37

No	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Jumlah
	7. SLTP Sederajat	3
	8. SD	3
c.	Berdasarkan Golongan	
	1. IV d	0
	2. IV c	0
	3. IV b	8
	4. IV a	16
	5. III d	35
	6. III c	26
	7. III b	24
	8. III a	5
	9. II d	9
	10. II c	7
	11. II b	5
	12. II a	3
	13. I d	0
	14. I c	3
	15. I b	0
d.	Berdasarkan Jabatan Struktural	
	1. Pejabat Eselon II	1
	2. Pejabat Eselon III	10
	3. Pejabat Eselon IV	28

2.2.3 SARANA PENDUKUNG

Sarana pendukung yang dimiliki dinas adalah berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset dokumen kearsipan. Secara umum, aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat diuraikan berikut ini :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Type C. Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) PPP berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2004 yaitu :
   1) PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung
   2) PPP Kota Agung di Kabupaten Tanggamus
   3) PPP Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur
   4) PPP Teladas di Kabupaten Tulang Bawang
2. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. BBIS tersebut didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal serta dempond yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

3. Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan (LPPHP)
4. Pasar Ikan Higienis
5. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis
6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
7. Kawasan Konservasi Perairan
8. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Tabel 2.3 Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	40	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
2	Peralatan dan Mesin	1.076	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
3	Gedung dan Bangunan	126	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	43	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
5	Aset tetap lainnya			
	Aset tetap dalam renovasi	2	Baik	Sarpras operasional dinas
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-		

2.3 KINERJA DAN PELAYANAN OPD

Untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kinerja dan pelayanan OPD sebagaimana yang tercantum dalam renstra, maka dilakukan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. PDRB Sektor Pertanian dan subsektor Perikanan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sektor perikanan berkontribusi dalam kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk menggambarkan perkembangan PDRB dari tahun ketahun digunakan data PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, dengan data 2014 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014 - 2018.

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry &Fishing***	**61 595 153,74**	**63 745 490,31**	**65 730 542,92**	**66 296 610,31**	**66 966 155,71**
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services*	48 352 449,08	50 250 342,76	51 840 120,71	51 728 504,63	52 825 166,13
	a. Tanaman Pangan/*Food Crops*	19 483 181,39	20 265 576,53	20 586 419,71	22 095 904,03	22 287 994,53
	b. Tanaman Hortikultura/*Horticultural Crops*	5 242 683,23	5 397 085,50	5 857 703,31	4 073 536,37	3 960 666,20
	c. Tanaman Perkebunan/*Plantation Crops*	14 464 769,76	15 090 829,60	15 381 186,45	14 914 657,49	15 424 670,19
	d. Peternakan/*Livestock*	7 751 682,64	8 012 336,33	8 430 689,05	9 167 419,52	9 696 663,14
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/*Agriculture Services and Hunting*	1 410 132,07	1 484 514,80	1 484 122,18	1 476 967,23	1 455 172,07
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/*Forestry and Logging*	692 703,41	736 848,33	800 059,54	787 523,62	784 818,62
	3. Perikanan/*Fishery*	12 550 001,25	12 758 299,22	13 090 362,68	13 780 582,06	13 356 170,96

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018 (BPS, 2019).

Kontribusi (share) sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain. Pada tahun 2014, sektor Pertanian berkontribusi 62,5 triliun rupiah atau menyumbang 32,42% dari PDRB ADHK Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha. Pada tahun 2018 diperkirakan menjadi 66,9 triliun rupiah atau menurun secara kontribusi menjadi sebesar 28,84%, sedangkan industri pengolahan berkontribusi sebanyak 18,62%. Data ini menjadi catatan penting agar pemerintah meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, termasuk perikanan sehingga kontribusi masing-masing sektor lebih proporsional. Dengan adanya nilai tambah pengolahan di lokasi sentra pertanian, selanjutnya akan meningkatkan PDRB Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Tabel 2.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Lampung (%), 2014 – 2018.

Kategori/ *Category*	Lapangan Usaha/ *Industry*	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry &Fishing***	**32,45**	**31,95**	**31,33**	**30,05**	**28,84**
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services*	25,48	25,18	24,71	23,45	22,75
	a. Tanaman Pangan/*Food Crops*	10,27	10,16	9,81	10,02	9,60
	b. Tanaman Hortikultura/*Horticultural Crops*	2,76	2,70	2,84	1,85	1,71
	c. Tanaman Perkebunan/*Plantation Crops*	7,62	7,56	7,33	6,76	6,64
	d. Peternakan/*Livestock*	4,08	4,02	4,02	4,16	4,18
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/*Agriculture Services and Hunting*	0,74	0,74	0,71	0,67	0,63
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/*Forestry and Logging*	0,36	0,37	0,38	0,36	0,34
	3. Perikanan/*Fishery*	6,61	6,39	6,24	6,25	5,75

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, (BPS, 2019).

Sektor Pertanian meliputi beberapa subsektor, yaitu 1). Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian; 2). Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan 3). Perikanan. Kontribusi masing-masing subsektor dalam nilai PDRB sektor pertanian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Komposisi subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB Sektor Pertanian menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Lampung (%), 2014 – 2018.

	Lapangan Usaha / *Industry*	2014	2015	2016	2017*	2018**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/*Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services*	79,01	79,44	79,80	78,98	79,76
	a. Tanaman Pangan/*Food Crops*	33,79	34,75	34,91	36,61	37,48
	b. Tanaman Hortikultura/*Horticultural Crops*	8,04	8,07	8,71	6,01	5,69
	c. Tanaman Perkebunan/*Plantation Crops*	22,80	21,94	21,03	20,13	19,93
	d. Peternakan/*Livestock*	11,94	11,99	12,50	13,59	14,15
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/*Agriculture Services and Hunting*	2,43	2,70	2,66	2,64	2,50
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/*Forestry and Logging*	1,20	1,34	1,54	1,54	1,51
3	Perikanan/*Fishery*	19,79	19,22	18,66	19,48	18,73
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishing*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, (BPS, 2019).

Berdasarkan Tabel 2.5. diatas, Subsektor Pertanian yang meliputi pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Sektor Pertanian sebesar 79,01% pada tahun 2014 kemudian meningkatan menjadi 79,76%** pada tahun 2018. Sedangkan subsektor perikanan berada pada urutan kedua, menyumbang 19,79% pada tahun 2014, menurun menjadi 18,73%** pada tahun 2018. Tren penurunan tersebut lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut ini;

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%), 2014 – 2018.

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, (BPS, 2019).

Meskipun peranannya terlihat stabil ditiap tahunnya, pertumbuhan sektor pertanian mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, khususnya subsektor pertanian. Bahkan berdasarkan Gambar 2.2. diatas, subsektor perikanan mengalami tren penurunan terbesar hingga -3,08% pada tahun 2018. Tren penurunan ini terkonfirmasi dengan tren penurunan produksi perikanan secara umum.

2. Produksi Perikanan

Tingkat kontribusi dan pertumbuhan Subsektor Perikanan ditunjukkan dengan perkembangan produksi perikanan di Provinsi Lampung. Sumber produksi perikanan Lampung berasal dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Untuk perikanan tangkap selama lima tahun terakhir, 2014-2018 tingkat produksinya mengalami fluktuasi.

Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari penjumlahan data-data produksi kabupaten/kota yang memiliki kawasan perairan laut dan nelayan serta hasil tangkapan dari perairan umum seperti sungai, waduk, danau dan rawa-rawa. Perkembangan produksi

perikanan tangkap sebagaimana Gambar 2.3. dibawah ini:

Gambar 2.3. Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 (ton)

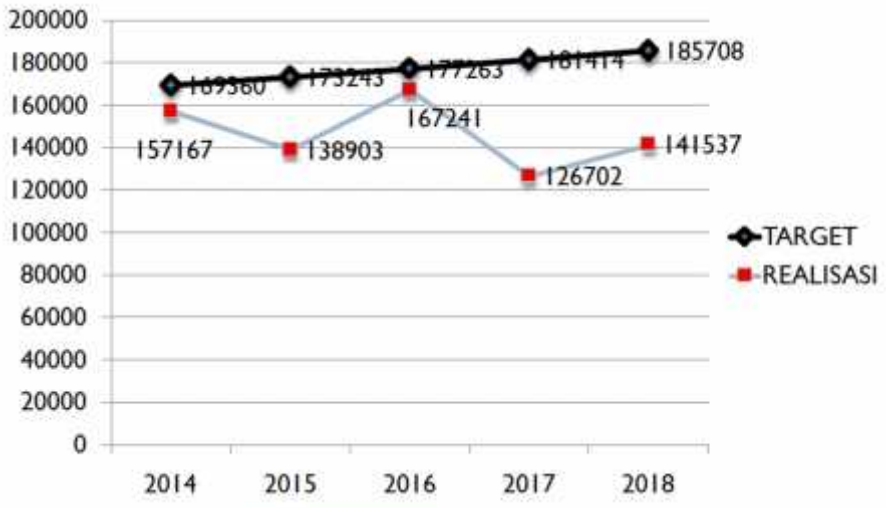

Sumber : LDA Lampung, 2014 – 2018; *Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung sangat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap mencapai 157.167 ton namun pada tahun 2018 justru menurun hingga 141.537 ton. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi penurunan tersebut, antara lain: faktor cuaca dan musim penangkapan yang mempengaruhi hasil tangkapan dan hari penangkapan nelayan, kebijakan pelarangan dan penggantian alat tangkap, termasuk perubahan sistem pengelolaan statistik perikanan (kebijakan/ aplikasi satu data). Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain mencakup: kapal dan alat tangkap, pelabuhan perikanan beserta fasilitasnya; serta perlu ditingkatkan Integrasi dan konektivitas antar pelabuhan perikanan belum optimal, termasuk sistem data dan informasi.

Selain hasil produksi perikanan tangkap, produksi perikanan juga berasal dari hasil produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi sebagaimana Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Lampung Tahun 2014-2018 (ton)

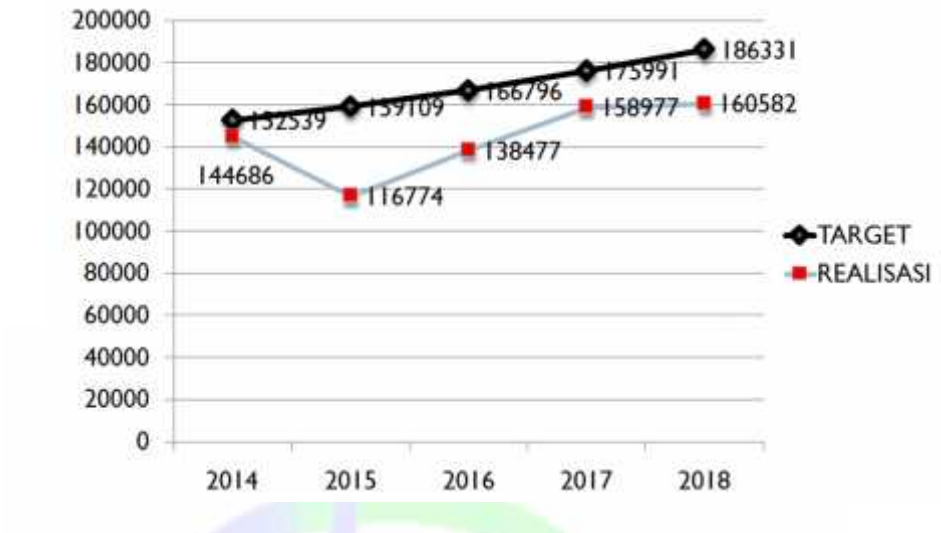

Sumber : LDA BPS Lampung, 2014 – 2018; *Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan budidaya di Provinsi Lampung cukup berfluktuasi dengan kecenderungan naik sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya mencapai 144.686 ton, kemudian menurun cukup besar (19%) pada tahun 2015 menjadi sebesar 116.774 ton. Hal ini antara lain disebabkan permasalahan di tambak ex Dipasena yang tidak lagi berlanjut. Kemudian pada tahun berikutnya kembali meningkat hingga pada tahun 2018 mencapai 160.582 ton. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan capaian kinerja produksi perikanan budidaya baru mencapai 86,18%. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya pada renstra 2019 – 2020 antara lain, revitalisasi/ pendampingan untuk mengembalikan produksi dan pengolahan di kawasan tambak ex Dipasena dan Bratasena, peningkatan produksi benih unggul dan berkualitas, pengembangan komoditas unggulan dan komoditas endemik serta pengembangan budidaya laut dan rumput laut.

3. Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan Tangkap (RTPP)

Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang ±950km dan luas wilayah perairan pesisir kurang lebih ±24.820km^2. Dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, maka banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada subsektor tersebut.

Rumah Tangga Perikanan adalah rumah tangga yang mata pencaharian dan jenis kegiatan usahanya bergerak pada subsektor perikanan. Rumah Tangga Perikanan

terbagai dalam beberapa jenis, yaitu RTPP Perikanan Budidaya, RTPP Pembudidaya, RTPP Nelayan Perikanan Laut, RTPP Nelayan Perairan Umum. RTPP Pembudidaya adalah RTPP dengan jumlah terbanyak, sedangkan RTPP Nelayan Perairan Umum adalah RTPP dengan jumlah paling sedikit. Kondisi RTPP Perikanan Tangkap dan Nelayan di Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTPP) Lampung Tahun 2014-2018

Tahun	RTP/P Nelayan Perikanan (Orang)	
	Perairan Laut	Perairan Umum
2014	7.771	5.677
2015	7.761	5.236
2016	7.443	10.434
2017	16.592	2.374

Sumber : LDA BPS Lampung, 2014 - 2019

Sementara itu jumlah RTPP Pembudidaya Ikan pada tahun 2014 sebanyak 53.060 Orang, dan hingga menjelang akhir tahun 2017 jumlah naik sekitar 55.348 Orang.

Tabel 2.7. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2014-2018

Tahun	Pembudidaya Ikan (Orang)
2014	53.060
2015	46.232
2016	55.248
2017	55.348

Sumber : LDA BPS Lampung, 2014 - 2019

Untuk meningkatkan validitas data pelaku usaha di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan program satu data KKP dan Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) mulai tahun 2016. Program tersebut bekerja sama dengan Penyuluh Perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang ada di seluruh Kabupaten/kota se Indoensia untuk mendata by name by addres seluruh pelaku usaha perikanan yang ada. Selanjutnya data tersebut menjadi database yang mendukung pengelolaan data statistik dan program bantuan pemerintah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan

Indikator perubahan harga yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli petani sebagai produsen di daerah pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi pertanian. NTP tersebut dapat dijabarkan lebih spesifik per subsektor. Untuk subsektor perikanan, umumnya menggunakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Gambaran umum Nilai Tukar Petani dan masing-masing sub sektornya sebagai mana pada Gambar 2.5. berikut ini:

Gambar 2.5. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung, 2017 – 2018.

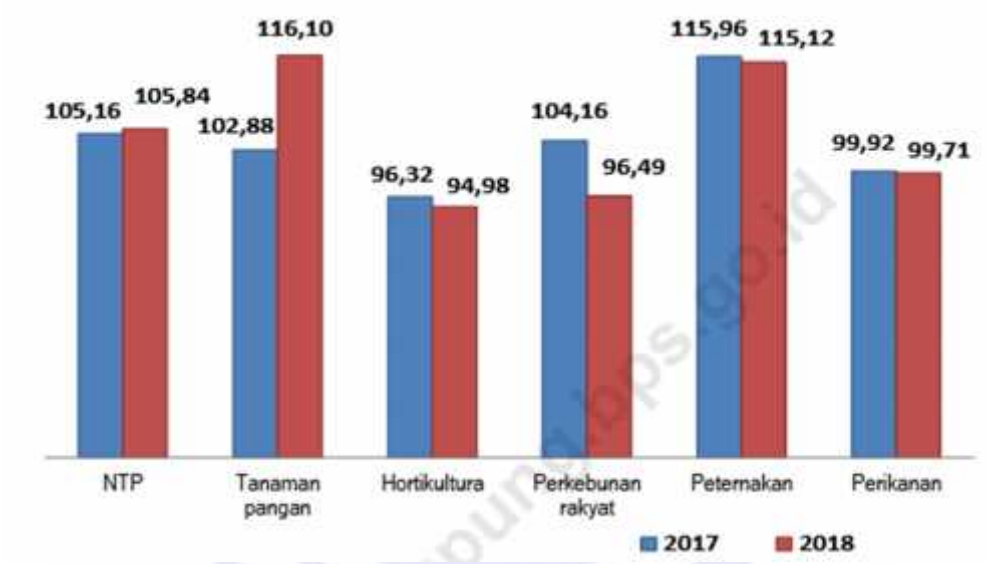

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2018 (BPS, 2019)

Secara total, NTP berada pada level cukup dengan nilai rata-rata pada tahun 2018 sebesar 105,84. Namun jika dilihat lebih rinci menurut sub sektor, ternyata tidak seluruhnya mengalami surplus. Surplus hanya dialami petani pada sub sektor tanaman pangan dan peternakan, sementara petani pada sub sektor tanaman hortikultura, perkebunan rakyat dan perikanan tidak mengalami surplus. Nilai tukar subsektor perikanan masih dibawah 100, yaitu 99,92 pada tahun 2017 dan menurun menjadi 99,71 pada tahun 2018. Sub sektor perikanan juga dibedakan menjadi Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Tren perkembangan masing-masing nilai tukar selama Januari 2015 – Februari 2019 sebagai mana dalam Gambar 2.6. dan Tabel 2.8. berikut:

Gambar 2.6. Perkembangan NTP Umum, NTP Perikanan Tangkap (NTN) dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) Provinsi Lampung, Januari 2015 – Februari 2019.

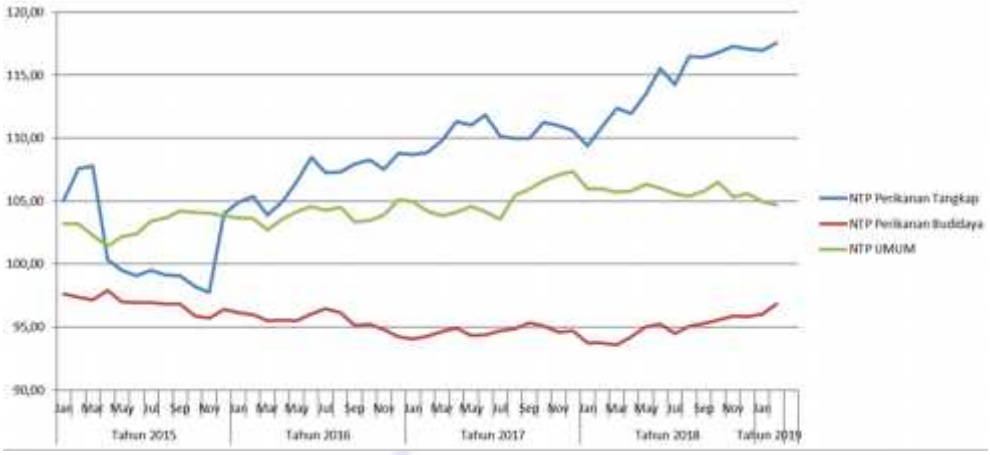

Tabel 2.8. Perkembangan NTP Umum dan subsektor penyusunannya, Januari 2015 – Februari 2019.

Sub Sektor	NTP		% Perubahan Feb 2019 Terhadap Jan 2015
	Januari 2015	Februari 2019	
Tanaman Pangan	102,74	119,31	16,12
Hortikultura	102,17	90,96	-10,97
Tanaman Perkebunan Rakyat	98,41	92,43	-6,08
Peternakan	112,36	113,99	1,44
Perikanan Tangkap	105,07	117,54	11,87
Perikanan Budidaya	97,63	96,84	-0,81
Umum	**103,20**	**104,69**	**1,44**

Berdasarkan Gambar 2.4. dan Tabel 2.8. perkembangan NTP umum dan NTP Perikanan Tangkap (NTN) menunjukkan tren kenaikan sedangkan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) justru menurun. NTN sejak tahun 2015 sudah mengalami surplus sebesar 5,07 dan meningkat menjadi 17,54 pada Januari 2019. Sedangkan NTPi pada tahun 2015 baru mencapai 97,63 bahkan menurun -0,81 pada awal tahun 2019 menjadi 96,84. Data ini menjadi catatan penting dan harus dicermati dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan berikutnya termasuk dalam penentuan prioritas pembiayaan.

5. Konsumsi Ikan per Kapita

Ikan merupakan salah satu sumber makanan hewani yang sangat baik untuk manusia karena berprotein tinggi. Tingkat konsumsi ikan masyarakat terus meningkat sejak 2014 hingga 2018 sebagaimana Gambar 2.7. berikut:

Gambar 2.7. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Provinsi Lampung (kg/kapita/th)

Sumber : Bidang PDS Dinas Kelautan dan Perikanan 2014 – 2018

Meskipun secara tren meningkat sejak tahun 2014, namun tingkat konsumsi ikan masyarakat Lampung masih jauh dari target dan capaian konsumsi ikan nasional. Pada tahun 2018 angka konsumsi ikan Provinsi Lampung mencapai 32,2 kg/kap/thn sedangka capaian nasional sudah sebesar 50,69 kg/kap/thn. Dari data tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan kampanye gerakan makan ikan (Gemarikan) dikabupaten/ kota, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk olahan termasuk meningkatkan ketersedian produksi ikan dengan harga yang kompetitif. Peningkatan angka konsumsi ikan menjadi penting dan strategis saat ini karena selain meningkatkan gizi dan sumber protein masyarakat sekaligus bagian dari penanganan stunting yang saat ini cukup menghawatirkan, termasuk di Provinsi Lampung.

6. Ekspor Impor Hasil Perikanan

Salah satu indikator kinerja keberhasilan pengelolaan sub sektor Kelautan dan Perikanan adalah dengan melihat kapasitas ekspor dari produk-produk pada sub sektor tersebut. Ekspor produk-produk perikanan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2014 - 2019 cenderung fluktuatif, sebagai mana terlihat pada Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan di Provinsi Lampung

Tahun	Ekspor Produk Perikanan (Ton)	Nilai Ekspor Produk Perikanan (US$)
2014	25.438,33	351.156.310
2015	27.458,14	260.050.188
2016	26.476,67	228.370.141
2017	17.174,39	176.430.012
2018	18.054,33	178.984.087

Sumber : LDA BPS 2015 - 2019

Sejak tahun 2014, terjadi kecenderungan penurunan volume

8. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini melibatkan kelompok-kelompok masyarakat perikanan yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran Kelompok masyarakat pengawasan ini dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Jumlah Pokmaswas dan Anggota Pokmaswas Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Pokmaswas		Jumlah Anggota	
1	Pesisir Barat	1	Kelompok	13	Orang
2	Lampung Barat	1	Kelompok	10	Orang
3	Pesawaran	1	Kelompok	10	Orang
4	Kota Metro	1	Kelompok	15	Orang
5	Tulang Bawang	1	Kelompok	26	Orang
6	Lampung Timur	1	Kelompok	25	Orang
7	Lampung Selatan	1	Kelompok	10	Orang
Total		7	Kelompok	109	Orang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2018

Secara umum operasional pengawasan masyarakat di Provinsi Lampung belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya sarana prasarana dan kemampuan (skill) anggota pokmas dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran di bidang perikanan, dan rendahnya kemampuan kelompok pengawas dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dibidang perikanan.

Selain itu, dalam rangka meminimalisir tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai 12 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan rincian 7 PPNS Daerah dan 5 PPNS Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut PPNS Perikanan mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan, dan pesisir) yang terjadi di wilayah ZEEI.

Tabel 2.10. Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2018

No	Nama	No SKEP PPNS Menteri Hukum dan HAM	Keterangan
1	Dr. Toga Mahaji, A.Pi, MM		
2	Sutaryono, A.Pi.	C-31 PW.07.03 Tahun 1994	PPNS Perikanan
3	Hermansyah	C-18.PW.07.03 Tahun 1994	PPNS Perikanan
4	Sukarsono, S.Pi.	C-45.HN.05.01 Tahun 2002	PPNS Perikanan
5	M. Aprizal Arsyita, S.St.Pi., M.H.	AHU-36.AH.09.01 Tahun 2013	PPNS Perikanan
6	Bidin, BBA	C-34.HN.05.01 Tahun 1999	PPNS Perda
7	Endro P. Basuki, A.Pi.	C-06.PW.05.01 Tahun 2001	PPNS Perda
8	Endarwan	C-62.HN.05.01 Tahun 2002	PPNS Perda
9	Heru Rochmadi, SE	C-07.HN.05.01 Tahun 2003	PPNS Perda
10	A. Faisal, A.Pi.	AHU-61.AH.09.01 Tahun 2008	PPNS Perda
11	Imam Pudjono P, A.Pi.	AHU-15.AH.09.01 Tahun 2009	PPNS Perda

9. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumberdaya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi konservasi kawasan, jenis dan genetik. Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dengan luas ± 162.637,9 Ha, dan masih ada ± 97.889,86 Ha yang belum terkelola (sebagaimana amanat Perda RZWP3K Provinsi Lampung). Kawasan Konservasi tersebut terdiri dari (1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Kab. Pesisir Barat (Ngambur dan Pulau Betuah, seluas 15.459,68ha); (2) Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan seluas 72.211,68ha; (3) Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas seluas 60.397,21ha; (4)

Kawasan Konservasi Perairan Pulau Batang Segama lampung timur seluas 14.569,30ha.

Tabel 2.11. Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Lampung 2018

NO.	WPP	KAB/KOTA	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	SK. BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR (PENCADANGAN)		SK. MKP (PENETAPAN)	
					THN	NOMOR	THN	NO
VII	Provinsi Lampung							
1	WPP 572	Lampung Barat	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) - taman pesisir ngambur dan taman Pulau Betuah	15.459	2007	SK Bupati Nomor : B/290/kpts/10-IV/2007 di rubah menjadi SK Bupati B/206/KPTS/II.12/2012	-	-
2	WPP 572	Tanggamus	Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan	76.214	2014	Keputusan Bupati Tanggamus No: B.399/32/11/2014	2019	v
3	WPP 572	Lampung Timur	Taman Pulau Batang Segama	14.569	2015	Keputusan Gubernur Lampung No. G/585/III.17.HK/2015	-	-

Sumber : KKP tahun 2016

Selain itu, terdapat juga kawasan Cagar Alam Laut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cagar Alam Laut terdapat pada dua lokasi yaitu Tanjung Keramat sepanjang 7 km di perbatasan Bengkulu seluas 1.500 ha dan wilayah perairan pantai dari Bengkunat sampai Tanjung Cina sepanjang 42 km meliputi kawasan seluas 20.000 ha.

Di perairan selat sunda terdapat Kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau yang secara administrasi pemerintahan berada dalam Kabupaten Lampung Selatan. Penetapan kawasan cagar alam laut ini merupakan perluasan Cagar Alam Krakatau melalui SK Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990, tanggal 26 Februari 1990.Perairan cagar alam laut meliputi areal seluas 12.000 ha sedangkan luas daratannya adalah 2.535 ha, terdiri dari Krakatau Besar (Rakata), Krakatau Kecil (Panjang), Anak Krakatau dan Pulau Sertung. Gugus Krakatau ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sejak tahun 1919.

10. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Realisasi Pendanaan.

Secara garis besar terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja yang dievaluasi, dengan 10 indikator terkait program kegiatan pembangunan dan 5 indikator pelayanan dan administrasi perangkat daerah. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (T-C.23)

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA					REALISASI PENCAPAIAN					RASIO PENCAPAIAN				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1). Produksi Hasil Perikanan Tangkap (ton)	173.248	177.264	181.414	185.708	190.155	138.903	167.241	126.702	141.537	81.953	80,2%	94,3%	69,8%	76,2%	43,1%
		2). Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,72	113,86	114,00	114,15	114,29	105,84	106,76	110,00	117,54	114,68	93,1%	93,8%	96,5%	103,0%	100,3%
II.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1). Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	169.744	178.281	188.396	199.728	212.206	116.774	138.477	158.977	160.582	118.885	68,8%	77,7%	84,4%	80,4%	56,0%
		2). Jumlah benih dengan mutu terjamin (juta ekor)	10.634	11.485	12.404	13.396	14.468			11.849	12.208				95,5%	91,1%	
III.	Program Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran dan Mutu Produksi Perikanan	1). Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Juta US $)	303	315	328	341	355	260,05	228,37	176,43	178,98		85,8%	72,4%	53,8%	52,5%	
		2). Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)	26,23	28,50	30,23	31,57	33,57	26,18	27,65	33,05	32,20		99,8%	97,0%	109,3%	102,0%	
		3). Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ribu ton)	50,29	55,32	60,85	66,94	73,63			0,31	46,90				0,5%	70,1%	
IV.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1). Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	200 %
		2). Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan (lokasi)	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	50%	50%
V.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Para Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	12 lokasi	15 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	12 lokasi	15 lokasi	100%	100%	100%	100%	100 %
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
VII.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
VIII.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sapras Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (1 Dinas, 4 UPTD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
IX.	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (dok)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
X.	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi kelautan dan Perikanan (kegiatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Berdasarkan Tabel diatas, sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk indikator kinerja utama, yaitu produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan nilai ekspor hasil perikanan masih belum memenuhi target. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam perumusan program dan kegiatan pada Renstra berikutnya. Pengaruh musim dan pergantian alat tangkap diperkirakan menyebabkan fluktuasi produksi perikanan tangkap. Sedangkan menurunnya produksi perikanan budidaya terutama disebabkan menurunnya produksi udang Provinsi Lampung. Ada permasalahan terkait manajemen/ pengelolaan kawasan udang ex Dipasena dan Bratasena, ditambah dengan menurunnya daya dukung dan serangan penyakit maupun virus dikawasan tambak yang dulu sempat berjaya. Menurunnya produksi udang juga berimbas pada menurunnya ekspor hasil perikanan Lampung yang memang didominasi oleh komoditas jenis penaeus tersebut.

Pencapaian kinerja juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam kondisi yang normal, program dan kegiatan yang sudah direncanakan mendapat alokasi pagu yang sesuai sehingga indikator kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kondisi yang lebih ideal apabila indikator kinerja tercapai meskipun alokasi pendanaan lebih kecil dari yang direncanakan. Realisasi pendanaan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah secara umum. Berikut ini adalah Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2015 – 2019 yang nilai realisasinya diambil setelah APBD Perubahan setiap tahunnya.

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan (T-C.24)

No	Uraian / Program	Anggaran Renstra (Rp.000)					Realisasi DPA (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Ang.	Rea-lisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.588.070	4.650.000	4.790.000	6.500.000	6.617.244	5.336.241	6.282.589	25.224.052	4.502.703	5.201.137	149%	135%	527%	69%	79%	29,6%	NA
II.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4.864.320	5.042.312	5.150.312	5.329.008	5.400.500	8.536.730	2.110.105	2.317.800	1.123.721	1.354.487	175%	42%	45%	21%	25%	3,66%	NA
III.	Program Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran dan Mutu Produksi Perikanan	4.415.000	4.600.000	4.750.000	4.237.000	4.340.242	3.104.765	1.295.195	1.600.000	659.000	496.345	70%	28%	34%	16%	11%	4,19%	NA
IV.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	5.100.000	5.300.000	5.500.000	5.550.000	5.500.000	5.383.616	3.846.200	2.699.500	1.033.856	907.345	106%	73%	49%	19%	16%	3,92%	NA
V.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	200.000	1.050.000	1.470.000	1.764.000	2.116.800	929.135	1.493.176	1.229.840	607.100	189.065	465%	142%	84%	34%	9%	40,%	NA
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	119.250	122.827	126.512	128.500	134.216	170.290	0	225.000	94.100	0	143%	0%	178%	73%	0%	3,0%	NA
VII.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.387.610	2.459.238	2.533.015	2.600.000	2.687.276	3.561.317	4.708.300	3.200.300	2.245.214	1.960.781	149%	191%	126%	86%	73%	3,0%	NA
VIII.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595.750	613.623	632.031	650.992	670.522	766.186	1.605.502	433.998	98.850	81.173	129%	262%	69%	15%	12%	3,0%	NA
IX.	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan dan Perikanan	400.000	650.000	730.000	850.000	900.000	431.396	716.593	550.380	120.368	125.916	108%	110%	75%	14%	14%	62,5%	NA
X.	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	1.330.000	350.000	488.130	370.000	400.000	1.315.714	1.125.340	1.023.130	0	54.500	99%	322%	210%	0%	14%	39,47%	NA
	Total	23.000.000	24.838.000	26.170.000	27.979.500	28.766.800	29.535.390	23.183.000	38.504.000	10.484.912	10.370.749	128%	93%	147%	37%	36%	7,99%	NA

Berdasarkan Tabel diatas, sampai dengan tahun 2017, realisasi pendanaan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satker nilainya tidak jauh dari yang direncanakan dalam Renstra maupun renja, bahkan pada tahun 2017 rasionya mencapai 147% dari rencana anggaran yang ditetapkan dengan proporsi terbesar pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Program Pengembangan Perikanan Tangkap umumnya mendapat alokasi Dana Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor kelautan dan perikanan untuk pembangunan pelabuhan perikanan di daerah.

Namun di 2 tahun terakhir RPJMD, realisasi pendanaan menurun drastis, terutama setelah ditetapkannya APBD Perubahan tahun berjalan. Pada tahun 2018 dan 2019, pemerintah daerah terpaksa menerapkan kebijakan efisiensi untuk menutupi defisit anggaran akibat tidak terpenuhinya target pendapatan. Bahkan ditahun 2019, pemerintah daerah harus menghadapi defisit 1,7 triliun akibat kebijakan hutang untuk pembangunan fisik, hutang dana bagi hasil kepada pemerintah kab/kota dan berkurangnya dana transfer pusat. Hal ini berimbas juga pada alokasi APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan dimana setelah penetapan APBD Perubahan TA. 2019 anggaran satker mengalami efisiensi sebesar -73% dari anggaran awal sebesar Rp.38.943.749.000,- menjadi hanya sebesar Rp.10.370.749.000,-

Dinamika pendanaan dan kondisi keuangan pemerintah daerah harus menjadi perhatian bersama dalam pengusulan pagu indikatif program dan kegiatan. Masing-masing bidang dan UPTD agar cermat menghitung kebutuhan belanja kegiatan, menetapkan prioritas dan fokus pada pencapaian indikator kinerja utama. Efisiensi dan efektifitas serta strategi kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan agar pencapaian indikator kinerja tidak harus membutuhkan atau tergantung pada pendanaan yang besar. Selain itu mencari sumber-sumber pendanaan diluar APBD seperti DAK, CSR maupun Swasta melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sejauh ini berdasarkan data di atas masih perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dinamika di lapangan dan masyarakat terus berkembang sehingga menciptakan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tantangan yang muncul diantaranya adalah:

1. Permasalahan kenelayanan; masih sedikitnya nelayan yang mendapat jaminan asuransi nelayan. Selain itu kurang dari 10% nelayan yang sudah memiliki dokumen kapal.
2. Trend nilai tukar pembudidaya (NTPi) di Provinsi Lampung masih dibawah 100, hal ini mengindikasikan kegiatan perikanan budidaya secara umum belum memberikan keuntungan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
3. Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu dan rumput laut.
4. Penataan kawasan tambak yang masih terbatas, persoalan pengelolaan kawasan tambak baik intensif maupun tradisional yang tidak optimal, penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan serta ancaman serangan penyakit.
5. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala
6. Penambahan kewenangan provinsi berdasarkan UU 23 tahun 2014 dibidang kelautan dan perikanan tidak didukung dengan penambahan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
7. Keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran untuk melaksanakan pengawasan di 15 Kabupaten/kota, mulai dari hulu – hilir termasuk IUU fishing, penegakan Perda RZWP3K, patroli laut dan pemeliharaan kapal/ speedboat pengawasan
8. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.

Tantangan diatas diimbangi dengan peluang yang ada :

1. Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan kelautan perikanan, antara lain :
   a. UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
   b. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
   c. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
   d. Undang-undang Tahun 2014 tentang Kelautan
   e. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
   f. Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Provinsi Lampung memiliki wilayah perairan dan potensi perikanan darat dan laut yang masih belum termanfaatkan secara optimal;
3. Sektor perikanan menjadi salah prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2024 melalui janji kerja Nelayan Berjaya.
4. Meningkatnya dukungan pusat dan DPR RI dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di daerah termasuk pengembangan kawasan industri maritim
5. Meningkatnya pengembangan wisata bahari dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi wilayah pesisir.
6. Bertambahnya kewenangan Provinsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan perairan dan wilayah pesisir.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Berdasarkan penelaahan data dan rangkuman isu/permasalahan, diidentifikasi beberapa permasalahan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Trend nilai tukar pembudidaya (NTPi) di Provinsi Lampung masih dibawah 100, hal ini mengindikasikan kegiatan perikanan budidaya secara umum belum memberikan keuntungan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
2. Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu dan rumput laut.
3. Penataan kawasan tambak yang masih terbatas, persoalan pengelolaan kawasan tambak baik intensif maupun tradisional yang tidak optimal, penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan serta ancaman serangan penyakit.
4. Masih sangat sedikit kapal perikanan di Provinsi Lampung yang memiliki perizinan (5% dari 10.121). Kondisi ini terutama disebabkan pengurusan dokumen kapal yang melibatkan instansi lain (KSOP) memiliki SDM yang bertugas mengukur kapal hanya 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Provinsi Lampung.
5. Permasalahan IUU Fishing, masih adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang dalam Permen 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perairan Negara RI, antara lain jenis Cantrang dan Dogol yang dimodifikasi (trawl). Adanya penyelundupan benur lobster di Pesisir Barat.
6. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus perizinan, perkembangan alokasi dan pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan rencana awal.

7. Penambahan kewenangan provinsi berdasarkan UU 23/2014 dibidang kelautan dan perikanan tidak didukung dengan penambahan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
8. Keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran untuk melaksanakan pengawasan di 15 Kabupaten/kota, mulai dari hulu – hilir termasuk IUU fishing, penegakan Perda RZWP3K, patroli laut dan pemeliharaan kapal/ speedboat pengawasan
9. Penerapan sistem rantai dingin dalam menjaga mutu hasil perikanan belum optimal. Keterbatasan kewenangan dan anggaran Pemerintah Provinsi, sarana dan prasarana yang belum mendukung dan tidak terintegrasi.
10. Permasalahan sampah pesisir harus dikelola dan diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh mulai dari mengurangi sumber sampah (pencemaran) dan penanganannya diwilayah pesisir, melibatkan seluruh stakeholder terkait.
11. Ancaman kerusakan wilayah pesisir karena pengembangan wisata bahari secara masif dan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir.
12. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2024), yaitu :***"Rakyat Lampung Berjaya"***; dengan 6 misi pembangunannya yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan I kan (TPI) dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian **Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan** serta **Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha.

Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan untuk mendukung Misi ke 5 tersebut yaitu:

a. Program Pengembangan PerikananTangkap
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
c. Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan

d. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Untuk melaksanakan Misi ke 6 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program :

a. Program Program Pengelolaan Ruang Laut
b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menyusun Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2020 - 2014. Telaah terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2020 – 2014, mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*); yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*); yakni Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkeadilan untuk generasi sekarang dan akan datang.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*); yakni Meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan.

Misi tersebut dalam rangka mewujudkan Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu

Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Secara khusus, arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru yaitu 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan 2) Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat lagi.

Untuk mewujudkan misi dan arahan Presiden tersebut, terdapat 5 (lima) kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh oleh KKP, yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis karena berada di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi pintu gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimum bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, sebagaimana sudah diubah dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan Perda No 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;

2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:

   a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
   b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
   c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
   d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur,

Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.

f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
   a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
   b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
   c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
   d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
   e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
   f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
   g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.

3.5. TELAAHAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, Luas Perairan Laut (12 mil) seluas 24.820,0 Km^2 dengan luas wilayah pesisir 440.010 Ha dan total luas daerah tangkapan perairan air tawar seluas 17.807 Km^2. Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai sepanjang 1.105

Km dan 132 pulau-pulau kecil. Selain itu Provinsi Lampung memiliki dua teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi meliputi satu Kota dan enam Kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. **Kawasan Pemanfaatan Umum**
   a. Zona Pariwisata (KPU-W)
   b. Zona Permukiman (KPU-PM)
   c. Zona Pelabuhan (KPU-PL)
   d. Zona Pertambangan (KPU-TB)
   e. Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)
   f. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)
   g. Zona Industri (KPU-ID)

Gambar 3.1. Peta Kawasan Pemanfaatan Umum

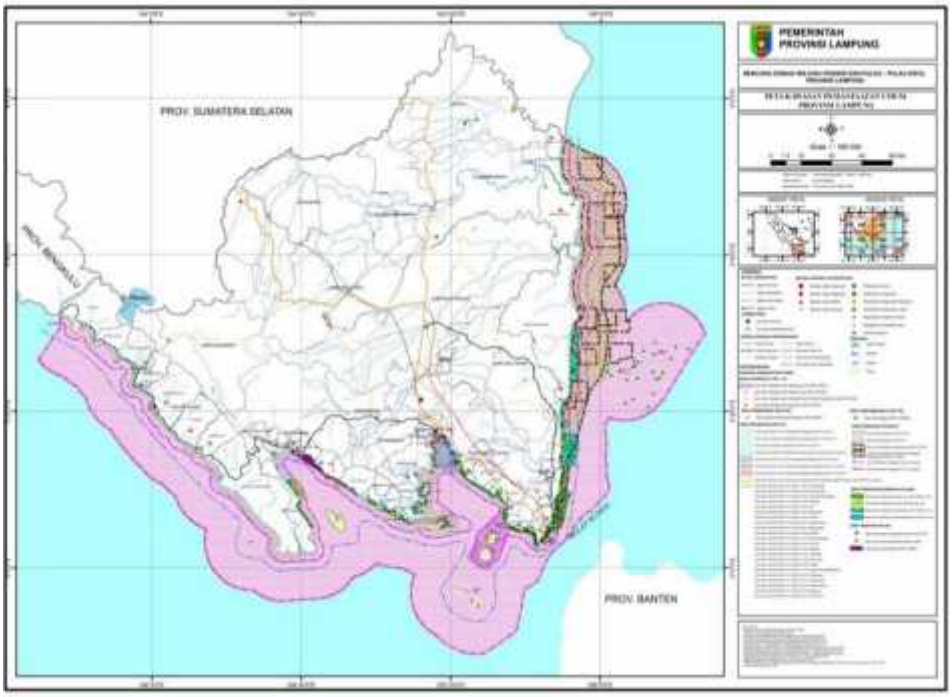

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

2. **Kawasan Konservasi**

   a. Kawasan Konservasi Perairan; dan
   b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Gambar 3.2. Peta Kawasan Pemanfaatan Umum

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

3. **Kawasan Strategis Nasional Tertentu**

   a. KSN Tertentu berupa pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Betuah di Kabupaten Pesisir Barat;
   b. Daerah latihan militer Teluk Lampung di Kabupaten Pesawaran (KSN-TL-1); dan
   c. Kawasan Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan (KSN-KSS-2).

Gambar 3.3. Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu

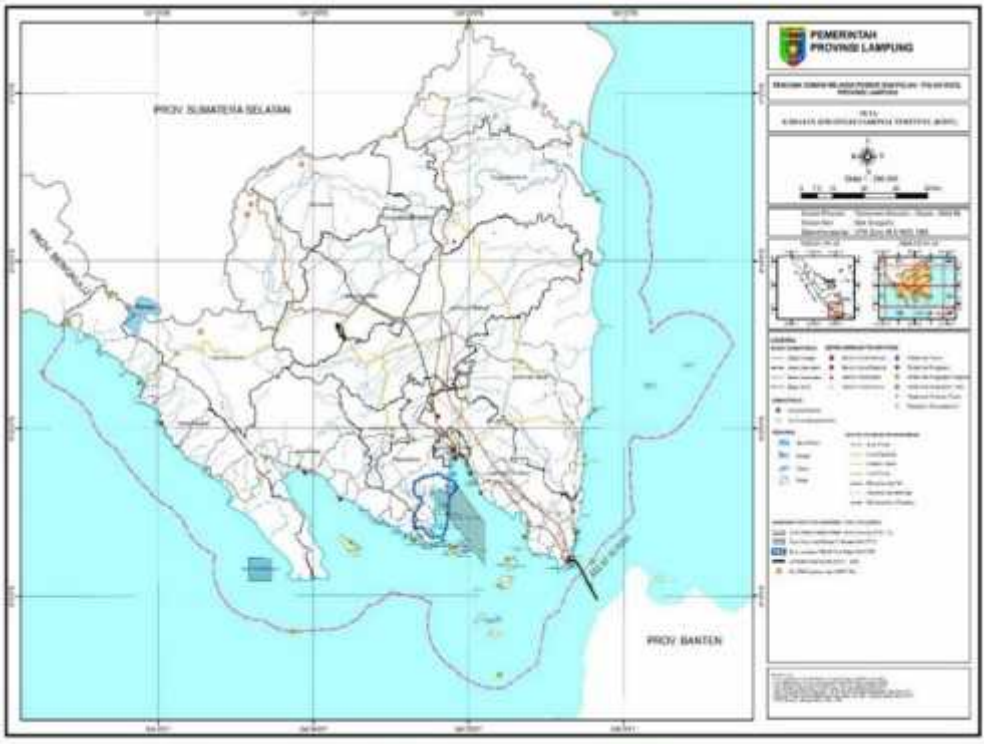

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

4. **Alur Laut**

   a. Alur Pelayaran: alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran local, alur pelayaran khusus, dan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
   b. Pipa/Kabel Bawah Laut: alur kabel Optik PT Telkom, alur Jaringan Pipa Gas, dan alur PLN/Transmisi Listrik 500 kV serta rencana alur kabel PLN; dan
   c. Migrasi Biota Laut : Alur Migrasi Mamalia Laut dan Alur Migrasi Penyu.

Gambar 3.4. Peta Alur Laut

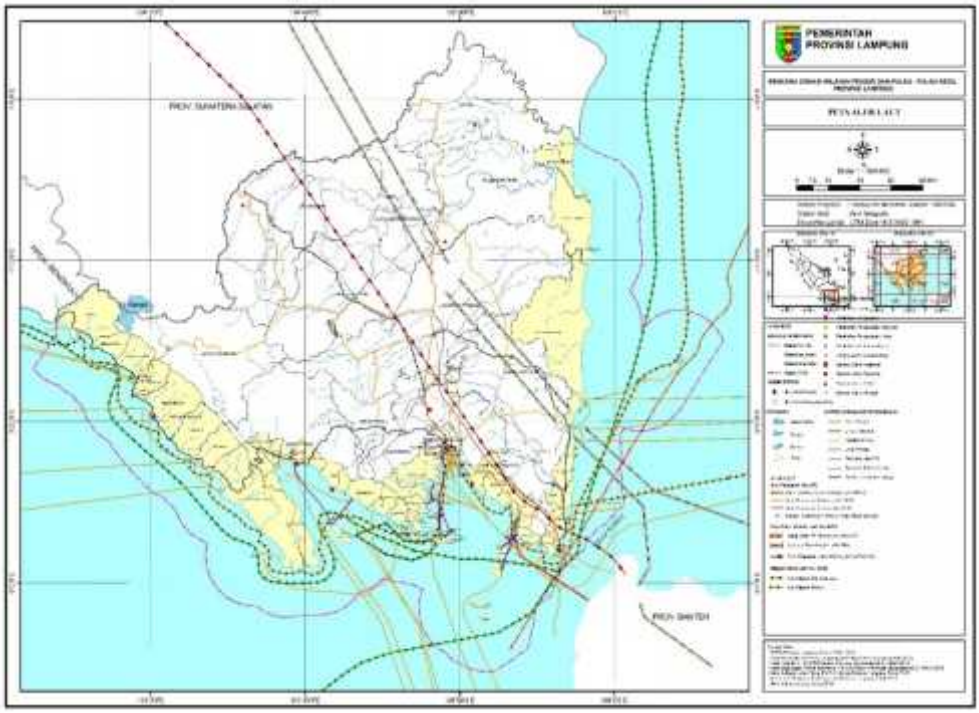

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi-misi, renstra OPD yang lalu, RTRW dan RZWP3K, maka dapat dihimpun isu strategis kelautan perikanan tersebut menjadi komponen SWOT yang secara sistematis dikelompokkan dalam komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan (*STRENGTH*)	Kelemahan (*WEAKNESS*)
õ Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis õ Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan. õ Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024. õ Hasil dan produk kelautan perikanan yang sudah ada õ Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD) õ Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung õ Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB)	õ Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah õ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha õ Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar õ Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB. õ Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap. õ Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP) õ Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi
Peluang (*OPORTUNITY*)	**Ancaman (*THREAT*)**
õ Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0 õ Meningkatnya permintaan produk hasil perikanan õ Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean õ Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias õ Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir õ Perubahan regulasi di level pusat. õ Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya.	õ Perkembangan budidaya dan industri pengolahan negara-negara Asean. õ Dampak perang dagang US – China dan perlambatan ekonomi global. õ Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan. õ Perubahan Iklim õ IUU Fishing õ Pencemaran dan sampah pesisir õ Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Mengacu kepada Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

Tabel 4.1. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Srategis dan Indikator Sasaran

No.	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1.	Rakyat Lampung Berjaya	(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Pencapaian (Prosentase) Produksi Perikanan
				Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan
		(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25)

Visi : **"Rakyat Lampung Berjaya"**

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Baseline Data (2018)	Target Capaian Indikator Sasaran					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan									
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	303.423 (ton)	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	18.054 (ton)	100	100	100	100	100	100
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama									
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase) pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	NA	80	85	90	95	100

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis SWOT dari isu-isu strategis maka terdapat beberapa strategi yang menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 2019-2020 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

   Arah Kebijakan :

   1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
   2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi
2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan

   Arah Kebijakan :

   3. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
   4. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya

   Arah Kebijakan :

   5. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan
   6. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2019-2020 juga memperhatikan pengarusutamaan dari:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Imlementasi SDGs (Goal 14), meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola.

2. Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (PPRB); Penyelarasan Renja tahunan dengan Pergub No: 164 thn 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung
3. Stunting; Prioritas daerah rawan stunting untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah dan Ibu Hamil, Meningkatkan angka kosumsi ikan masyarakat.
4. Penanggulangan kemiskinan; Penyelarasan lokasi dan sasaran kegiatan/ bantuan pada rumah tangga miskin yang berpotensi.
5. Gender; Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP

Tabel 5.1. Analisis SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
	• Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis • Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan. • Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024. • Hasil dan produk kelautan perikanan yang sudah ada • Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD) • Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung • Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB)	• Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah • Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha • Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar • Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB. • Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap. • Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP) • Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi
OPORTUNITY • Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0 • Meningkatnya permintaan produk hasil perikanan • Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean • Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias • Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir • Perubahan regulasi di level pusat. • Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya	STRATEGI S-O ✓ Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ✓ Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan ✓ pemasaran produk perikanan ✓ Kartu Petani Berjaya. ✓ Penyediaan sarana dan prasarana perikanan	STRATEGI W-O ✓ Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan. ✓ Peningkatan akses keuangan dan kredit UMKM ✓ Pemanfaatan teknologi budidaya dan pakan mandiri. ✓ Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan ✓ Pemanfaatan aplikasi/ start up di sektor kelautan dan perikanan.
THREAT • Perkembangan budidaya dan industri pengolahan negara-negara Asean. • Dampak perang dagang US – China dan perlambatan ekonomi global. • Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan. • Perubahan Iklim • IUU Fishing • Pencemaran dan sampah pesisir • Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut	STRATEGI S-T ✓ Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi ✓ Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha perikanan. ✓ Pemberdayaan POKMASWAS. ✓ Penguatan koordinasi lintas sektor pengawasan.	STRATEGI W-T ✓ Penataan kawasan sentra perikanan dan kelautan ✓ Branding produk dan strategi pemasaran di era Digital

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T-C.26)

Visi (RPJMD) :	Rakyat Lampung Berjaya			
Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Strategi	Arah Kebijakan
(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	1. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	1.1. Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	1. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan	1. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan 2. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
		1.2. Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	1. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.
(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	2. Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	2.1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan 2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kerja tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dengan capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk disektor kelautan dan perikanan.

Dalam mewujudkan capaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta tugas pokok dan fungsi OPD sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Potensi Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung sangat bervariasi, mulai dari komoditas lobster dan tuna di Pesisir Barat, berbagai ikan pelagis dan demersal di Teluk Semaka dan Teluk Lampung sampai dengan Udang dan Rajungan di Pesisir Timur. Permasalahan yang dihadapipun cukup kompleks, diantaranya masih sangat sedikit kapal perikanan yang memiliki dokumen perizinan, masih adanya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/ IUU fishing, rendahnya mutu hasil tangkapan sampai dengan kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota. Provinsi Lampung memiliki 4 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang juga perlu mendapat dukungan anggaran operasional dan pengembangan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa kegiatan yang mendukung Pengembangan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung meliputi:

1) Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2) Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan
3) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan
4) Penyediaan sarana dan prasarana nelayan
5) Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan
6) Pembinaan dan monitoring program kenelayanan
7) Peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya
8) Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah
9) Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung
10) Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan
11) Pembinaan dan pendampingan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Pelabuhan dan TPI Hygienis
12) Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing
13) Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai
14) Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung

II. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Potensi perikanan budidaya di Provinsi Lampung cukup lengkap, mulai dari budidaya laut (kerapu, kerang hijau, rumput laut), budidaya air tawar (lele, patin, mas, gurame, dsb) dan budidaya air payau/ tambak (udang vaname, windu dan bandeng), bahkan Lampung sempat memiliki kawasan budidaya udang terbesar di Indonesia. Sayangnya saat ini kegiatan budidaya menghadapi beberapa masalah, mulai dari trend menurunnya produksi, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang masih rendah (< 100), menurunnya daya dukung lingkungan hingga masalah penyakit. Meskipun provinsi Lampung juga masuk dalam 10 besar pensuplai benih/benur nasional, namun kondisi balai-balai benih milik pemerintah justru beroperasi tidak optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan budidaya perikanan dan perbenihan di Provinsi Lampung meliputi:

1) Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan
2) Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan.

3) Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan
4) Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit
5) Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan
6) Operasional Kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan

III. Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan

Dengan beragamnya produksi perikanan di Provinsi Lampung, baik yang berasal dari penangkapan maupun budidaya, perlu didukung pengolahan, pemasaran dan peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah dan peningkatan daya saing produk perikanan Lampung. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan perlu berperan aktif dalam mengurangi permasalahan stunting dan pemenuhan gizi sumber protein masyarakat. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pengolahan, pemasaran dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang meliputi

1) Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
2) Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar.
3) Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar
4) Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan

IV. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) unit Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPHP) yang sudah terakreditasi KAN sebagai Lembaga Pengujian (ISO SNI 17025) dan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan / LS Pro HP (ISO SNI 17065). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ini melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan produk hasil perikanan, monitoring keamanan pangan serta penilaian kesesuain SNI produk olahan hasil perikanan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan
2) Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu sampai Hilir
3) Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

4) Peningkatan kualitas layanan di UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

V. Program Pengelolaan Ruang Laut

Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil ke Provinsi, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, maka pengelolaan ruang laut khususnya wilayah perairan 0-12 mil sepenuhnya menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi OPD untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan didalamnya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan yang mendukung pengelolaan ruang laut sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut
2) Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan
3) Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
4) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
5) Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi

VI. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selain pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dilimpahkan sepenuhnya kepada Provinsi. Hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab dan tantangan besar bagi provinsi mengingat keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki bila harus mengawasi seluruh wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, strategi pengawasan terpadu dan terintegrasi dengan stakeholder terkait menjadi prioritas, didukung dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas dan patroli bersama.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan
2) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
3) Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4) Penyediaan Operasional Patroli Laut dan Pemeliharaan Kapal Pengawasan
5) Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Selain yang mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan secara langsung, OPD juga melaksanakan Program yang termasuk Administrasi Umum (kesekretariatan), yang meliputi:

VII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
IX. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
X. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah

Secara detail Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Indikatif untuk Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2019 – 2024 sebagaimana dalam Lampiran 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C.28)

No	Indikator	Baseline Data (2018)	Target Capaian Indikator Sasaran						Kondisi Kinerja pada Akhir periode
			2019 (T0)	2020(T1)	2021 (T2)	2022 (T3)	2023 (T4)	2024 (T5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	303.423	(100) 343.602	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694	(100) 473.694
2.	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	18.054	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)	100 (29.076)
3.	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	NA	80	85	90	95	100	100

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang mendukung pada pencapaian sasaran RPJMD yaitu (1) Jumlah Produksi Perikanan dan (2) Jumlah Ekspor Perikanan yang mendukung Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian serta (3) Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung. Indikator tersebut selanjutnya dijabarkan dalam indikator Program dan Kegiatan yang secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada indikator kinerja daerah provinsi lampung sebagaimana dijelaskan dalam Tabel. 7.2 berikut ini:

Tabel 7.2. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan
1.	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	Dihitung berdasarkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam 1 tahun dibagi dengan Target Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dikali 100 persen.
2.	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	Dihitung berdasarkan Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dalam 1 tahun dibagi dengan Target Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dikali 100 persen.
3.	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	Dihitung berdasarkan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K dibagi dengan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.

BAB 8 PENUTUP

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari tahapan perencanaan yang baik dan cermat. Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya menjadi pedoman, arah kebijakan dan sekaligus alat ukur dalam evaluasi dan monitoring terhadap capaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Namun demikian, renstra bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renstra mulai dari misi, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat diubah untuk menyesuai dengan perubahan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi. Masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam penyusunan dimasa-masa yang akan datang.

Demikianlah dokumen Renstra ini disusun, tanpa dukungan anggaran yng memadai dan kerjasama seluruh pihak terkait, maka target yang ingin dicapai pada akhir periode akan sulit terwujud. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat, menuju pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Lampung lebih baik dari tahun ke tahun. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini.

Bandar Lampung, 21 Desember 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST, MT.
NIP. 19730222 200312 1 010

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PROGRAM																	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	3.1.20	**I.**	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**1). Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**142.840**	**188.790,09**	**10.779.800**	**193.509,84**	**10.040.000**	**198.347,58**	**10.140.000**	**203.306,27**	**10.240.000**	**208.388,93**	**10.590.000**	**208.388,93**	**51.789.800**	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Lampung
						2). Nilai Tukar Nelatan (NTN)	117,10	117,69		118,27		118,87		119,46		120,06		120,06			
				KEGIATAN																	
				1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah PUD yang dikelola dan lokasi inventarisasi potensi sumberdaya ikan.	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	300.000	2 Kab/Kota	450.000	2 Kab/Kota	450.000	2 Kab/Kota	450.000	2 Kab/Kota	450.000	12 Kab/Kota	2.100.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
				2	Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan	Jumlah lokasi program Inisiatif pengelolaan perikanan ranjungan berkelanjutan (IPPRB)	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	200.000	3 Kab/Kota	300.000	3 Kab/Kota	300.000	3 Kab/Kota	300.000	3 Kab/Kota	300.000	3 Kab/Kota	1.400.000	Bid. PT	Lampung Tengah, Tl. Bawang,
				3	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia.	-	5 dokumen	100.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	15 dokumen	700.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
				4	Penyediaan sarana dan prasarana nelayan	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar (paket)	10 paket	10 paket	300.000	10 paket	750.000	10 paket	750.000	10 paket	750.000	10 paket	1.000.000	50 paket	3.550.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
				5	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	Jumlah kapal perikanan yang didaftarkan dan memiliki tanda kapal	100 unit	100 unit	100.000	100 unit	150.000	100 unit	150.000	100 unit	150.000	100 unit	150.000	500 unit	700.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
				6	Pembinaan dan monitoring program kenelayanan	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan(kegiatan)	30 kegiatan	30 kegiatan	250.000	36 kegiatan	250.000	42 kegiatan	250.000	45 kegiatan	250.000	48 kegiatan	250.000	48 kegiatan	1.250.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
				7	Peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat	4.804 orang	2000 orang	450.000	2000 orang	550.000	2000 orang	650.000	2000 orang	750.000	2000 orang	850.000	10000 orang	3.250.000	Bid. PT	Provinsi Lampung
				8	Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha	300 Nelayan	1000 Nelayan	440.000	1000 Nelayan	240.000	1000 Nelayan	240.000	1000 Nelayan	240.000	1000 Nelayan	240.000	5300 Nelayan	1.400.000	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
				9	Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	2 Pelabuhan	2 lokasi	4.193.000	2 lokasi	5.000.000	2 lokasi	5.000.000	2 lokasi	5.000.000	2 lokasi	5.000.000	10 lokasi	24.193.000	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
				10	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan	Jumlah lokasi Pelayanan Kesyahbandaran dan Penerbitan SHTI di Pelabuhan Perikanan (pelabuhan)	3 pelabuhan	3 lokasi	300.000	3 lokasi	300.000	3 lokasi	300.000	3 lokasi	300.000	3 lokasi	300.000	3 lokasi	1.500.000	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
				11	Pembinaan dan pendampingan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Pelabuhan dan TPI Hygienis	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	3 pelabuhan	9 pelabuhan	250.000	9 pelabuhan	500.000	9 pelabuhan	500.000	9 pelabuhan	500.000	9 pelabuhan	500.000	9 pelabuhan	2.250.000	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
				12	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan yang dikelola (UPTD)	1 PPP	1 PPP	1.000.000	1 PPP	500.000	1 PPP	500.000	1 PPP	500.000	1 PPP	500.000	1 PPP	3.000.000	UPTD PP	Lempasing
				13	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan yang dikelola (UPTD)	2 PPP	2 PPP	946.800	2 PPP	500.000	2 PPP	500.000	2 PPP	500.000	2 PPP	500.000	2 PPP	2.946.800	UPTD PP	Labuhan Maringgai & Teladas
				14	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan yang dikelola (UPTD)	1 PPP	1 PPP	1.950.000	1 PPP	400.000	1 PPP	400.000	1 PPP	400.000	1 PPP	400.000	1 PPP	3.550.000	UPTD PP	Kota Agung
				PROGRAM																	
			3.1.21	**II.**	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**1). Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**160.582,92**	**191.358,54**	**3.380.000**	**205.040,53**	**4.100.000**	**223.513,21**	**4.100.000**	**239.249,59**	**4.100.000**	**265.305,47**	**3.600.000**	**265.305,47**	**19.280.000**		
						2). Jumlah benih (juta ekor)	**12.209,47**	**13.634,44**		**14.485,19**		**15.404,01**		**16.396,33**		**17.468,03**		**17.468,03**			
						3). Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	**95,84**	**97,28**		**98,74**		**100,22**		**101,72**		**103,25**		**103,25**			
				KEGIATAN																	
				1	Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina (kelompok)	15	60	330.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000	300	1.530.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				2	Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan.	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya	-	60	150.000	60	400.000	60	400.000	60	400.000	60	400.000	300	1.750.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				3	Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	5 paket	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	100	5.000.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				4	Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	15	15	100.000	15	400.000	15	400.000	15	400.000	15	400.000	75	1.700.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				5	Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan	200	30	1.500.000	30	1.500.000	30	1.500.000	30	1.500.000	30	1.000.000	150	7.000.000	UPTD BBI	Provinsi Lampung
				6	Operasional Kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dikelola (UPTD)	1	1	300.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	2.300.000	UPTD BBI	Tanggamus, Lampung Timur
				PROGRAM																	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase Pencapaian ekspor perikanan		**III.**	**Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan**	**1). Volume Ekspor Perikanan (kg)**	**########## ###**	**19.859.765**	**1.200.000**	**21.845.742**	**1.750.000**	**24.030.316**	**1.750.000**	**26.433.347**	**1.750.000**	**29.076.682**	**1.750.000**	**29.076.682**	**8.200.000**	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
						2). Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)	**32,20**	**34,54**		**36,09**		**37,72**		**39,41**		**41,19**		**41,19**			
				KEGIATAN																	
				1	Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah sasaran/peserta yang menerima pemberian makanan tambahan berbahan ikan	1.500 anak	2.100 anak	440.000	2.200 anak	550.000	2.300 anak	550.000	2.400 anak	550.000	2.500 anak	550.000	2.500 anak	2.640.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				2	Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkat kompetensinya	-	90 orang	150.000	90 orang	400.000	90 orang	400.000	90 orang	400.000	90 orang	400.000	450 orang	1.750.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				3	Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	-	10 paket	350.000	10 paket	500.000	10 paket	500.000	10 paket	500.000	10 paket	500.000	50 paket	2.350.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				4	Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	-	2 dokumen	260.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	300.000	10 dokumen	1.460.000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
				PROGRAM																	
			-	**IV.**	**Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	**Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar**		**15**	**1.550.500**	**30**	**2.800.000**	**45**	**2.300.000**	**60**	**1.800.000**	**75**	**1.800.000**	**75**	**10.250.500**	UPTD LPPHP	Provinsi Lampung
				KEGIATAN																	
				1	Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan	Jumlah produk, UMKM, UPI dan unit budidaya yang sesuai standar	10	15	172.000	30	300.000	45	300.000	60	300.000	75	300.000	75	1.372.000	UPTD LPPHP	Provinsi Lampung
				2	Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu sampai Hilir	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	283	300 sampel	410.500	330 sampel	500.000	350 sampel	500.000	380 sampel	500.000	400 sampel	500.000	1.660	2.410.500	UPTD LPPHP	Provinsi Lampung
				3	Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	1 lab	1 lab	715.000	1 lab	1.000.000	1 lab	750.000	1 lab	500.000	1 lab	500.000	1 lab	3.465.000	UPTD LPPHP	Bandar Lampung
				4	Peningkatan kualitas layanan di UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah lembaga terakreditasi yang disediakan operasionalnya	2 unit	2 unit	253.000	3 unit	1.000.000	3 unit	750.000	3 unit	500.000	3 unit	500.000	3 unit	3.003.000	UPTD LPPHP	Bandar Lampung
				PROGRAM																	
Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	-	**V.**	**Program Pengelolaan Ruang Laut**	**1). Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)**	**NA**	**80**	**1.725.000**	**85**	**1.950.000**	**90**	**2.000.000**	**95**	**1.950.000**	**100**	**1.900.000**	**100**	**9.525.000**	Bid PRL	Provinsi Lampung
						2). Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil (ha)	**106.000**	**192.240**		**231.467**		**270.693**		**309.920**		**349.147**		**349.147**			
				KEGIATAN																	
				1	Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksananya yang diterbitkan	1 dokumen	2 dokumen	375.000	2 dokumen	500.000	2 dokumen	400.000	2 dokumen	300.000	2 dokumen	200.000	2 dokumen	1.775.000	Bid PRL	Provinsi Lampung
				2	Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik	2 lokasi	3 lokasi	250.000	4 lokasi	300.000	4 lokasi	300.000	5 lokasi	300.000	5 lokasi	300.000	3 lokasi	1.450.000	Bid PRL	Provinsi Lampung
				3	Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100	80	300.000	85	250.000	90	300.000	95	350.000	95	400.000	95	1.600.000	Bid PRL	Provinsi Lampung
				4	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	106.000	**192.240**	350.000	**231.467**	400.000	**270.693**	400.000	**309.920**	400.000	**349.147**	400.000	349.147	1.950.000	Bid PRL	Provinsi Lampung
				5	Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola	1 lokasi	2 lokasi	450.000	2 lokasi	500.000	2 lokasi	600.000	3 lokasi	600.000	3 lokasi	600.000	3 lokasi	2.750.000	Bid PRL	Kab/Kota Pesisir

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
				PROGRAM																	
			3.01.1.16	**VI.**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**1). Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan**	100	100	**2.200.000**	100	**3.000.000**	100	**3.100.000**	100	**3.150.000**	100	**3.300.000**	100	**14.750.000**	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
						2) Meningkatnya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Para Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan		5 lokasi		7 lokasi		9 lokasi		12 lokasi		15 lokasi		15 lokasi			
				KEGIATAN																	
				1	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi	NA	45 unit	450.000	60 unit	600.000	75 unit	700.000	75 unit	750.000	75 unit	800.000	330 Unit	3.300.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
				2	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Jumlah pokmaswas yang dibina	15 pokmaswas	18 pokmaswas	200.000	21 pokmaswas	500.000	24 pokmaswas	600.000	27 pokmaswas	600.000	30 pokmaswas	700.000	30 pokmaswas	2.600.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
				3	Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	100	100	150.000	100	400.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	1.450.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
				4	Penyediaan Operasional Patroli Laut dan Pemeliharaan Kapal Pengawasan	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut	2 unit	2 unit	850.000	2 unit	600.000	3 unit	600.000	3 unit	600.000	3 unit	600.000	3 unit	3.250.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
				5	Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang disediakan	-	5 paket	100.000	5 paket	300.000	5 paket	300.000	5 paket	300.000	5 paket	300.000	25 paket	1.300.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
				6	Bantuan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang terlibat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	-	7 kab/kota	450.000	9 kab/kota	600.000	11 kab/kota	600.000	13 kab/kota	600.000	15 kab/kota	600.000	15 kab/kota	2.850.000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
				PROGRAM																	
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	**Meningkatnya penilaian Laporan Akuntabilitas kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan**	**Laporan Akuntabilitas kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan min C**	3.01.1.01	**VII.**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**	**75%**	**100%**	**3.416.400**	**100%**	**3.517.000**	**100%**	**3.648.000**	**100%**	**3.761.000**	**100%**	**3.872.000**	**100%**	**18.214.400**	Sekretariat	Provinsi Lampung
				KEGIATAN																	
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	470.000	100%	485.000	100%	500.000	100%	515.000	100%	530.000	100%	2.500.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	1.075.000	100%	1.100.000	100%	1.125.000	100%	1.150.000	100%	1.175.000	100%	5.625.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan/ peralatan kebersihan kantor	100%	100%	75.000	100%	25.000	100%	28.000	100%	32.000	100%	35.000	100%	195.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja	60 unit	60 unit	25.000	65 unit	25.000	70 unit	28.000	70 unit	32.000	70 unit	35.000	20 unit	145.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	50 buah	50 buah	60.000	50 buah	32.000	50 buah	34.000	50 buah	36.000	50 buah	38.000	50 buah	200.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				6	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	50 buah	50 buah	60.000	50 buah	32.000	50 buah	34.000	50 buah	36.000	50 buah	38.000	50 buah	200.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	50 buah	60.000	50 buah	32.000	50 buah	34.000	50 buah	36.000	50 buah	38.000	50 buah	200.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	-	20 buah	60.000	20 buah	32.000	20 buah	34.000	20 buah	36.000	20 buah	38.000	20 buah	200.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 jenis	20 jenis	50.000	20 jenis	32.000	20 jenis	34.000	20 jenis	36.000	20 jenis	38.000	20 jenis	190.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	340 kali	360 kali	80.000	380 kali	35.000	400 kali	40.000	400 kali	45.000	400 kali	50.000	400 kali	250.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	30 kali	50 kali	250.000	50 kali	300.000	50 kali	350.000	50 kali	400.000	50 kali	450.000	50 kali	1.750.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				12	Penyediaan Jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	4 orang	6 orang	98.400	6 orang	100.000	6 orang	120.000	6 orang	120.000	6 orang	120.000	6 orang	558.400	Sekretariat	Bandar Lampung
				13	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL	41 orang	50 orang	1.053.000	50 orang	1.287.000	50 orang	1.287.000	50 orang	1.287.000	50 orang	1.287.000	50 orang	6.201.000	Sekretariat	Bandar Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
				PROGRAM																	
			3.01.1.02	**VIII.**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Sapras Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (1**		**100%**	**648.300**	**100%**	**880.000**	**100%**	**935.000**	**100%**	**990.000**	**100%**	**1.050.000**	**100%**	**4.503.300**		Bandar Lampung
				KEGIATAN																	
				1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	1 unit	68.300	1 unit	250.000	1 unit	250.000	1 unit	250.000	1 unit	250.000	5 unit	1.068.300	Sekretariat	Bandar Lampung
				2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	10 unit	50.000	10 unit	180.000	10 unit	210.000	10 unit	240.000	10 unit	270.000	10 unit	950.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	1 paket	1 unit	200.000	1 unit	200.000	1 unit	200.000	1 unit	200.000	1 unit	200.000	1 unit	1.000.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	30 unit	180.000	35 unit	150.000	40 unit	175.000	40 unit	200.000	40 unit	230.000	40 unit	935.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				5	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	5 unit	150.000	5 unit	100.000	5 unit	100.000	5 unit	100.000	5 unit	100.000	5 unit	550.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				PROGRAM																	
			-	**IX.**	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)**		**100%**	**300.000**	**100%**	**300.000**	**100%**	**300.000**	**100%**	**300.000**	**100%**	**300.000**	**100%**	**1.500.000**		Provinsi Lampung
				KEGIATAN																	
				1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	120 orang	120 orang	125.000	140 orang	125.000	140 orang	125.000	140 orang	125.000	140 orang	125.000	140 orang	625.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
				2	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	90 persen	90 persen	50.000	90 persen	50.000	90 persen	50.000	90 persen	50.000	95 persen	50.000	95 persen	250.000	Sekretariat	Bandar Lampung
						Jumlah pembinaan budaya kerja	kali	kali		kali		kali		kali		kali			-		
						Jumlah Dokumen pemutakhiran Anjab,	dokumen	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen			-		
				3	Peningkatan kehumasan dan pelayanan keterbukaan informasi publik	Ketersediaan pelayanan informasi publik	pelayanan	1 pelayanan	50.000	1 pelayanan	50.000	1 pelayanan	50.000	1 pelayanan	50.000	1 pelayanan	50.000	1 pelayanan	250.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	185 stel	75.000	185 stel	75.000	185 stel	75.000	185 stel	75.000	185 stel	75.000	185 stel	375.000	Sekretariat	Bandar Lampung
				PROGRAM																	
			-	**X.**	**Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan**		**100%**	**800.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**800.000**	**100%**	**4.000.000**		Provinsi Lampung
				KEGIATAN																	
				1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan	6 dokumen	6 dokumen	150.000	6 dokumen	150.000	6 dokumen	150.000	6 dokumen	150.000	6 dokumen	150.000	6 dokumen	750.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
				2	Penyusunan Laporan capaian keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan	1 dokumen	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	750.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
				3	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana	5 dokumen	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	150.000	5 dokumen	750.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
				4	Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government Pameran	Aplikasi e Goverment dan pameran	Aplikasi e Goverment dan pameran	200.000	Aplikasi e Goverment dan pameran	200.000	Aplikasi e Goverment dan pameran	200.000	Aplikasi e Goverment dan pameran	200.000	Aplikasi e Goverment dan pameran	200.000	Aplikasi e Goverment dan pameran	1.000.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
				5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	1 dokumen	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	150.000	1 dokumen	750.000	Sekretariat	Provinsi Lampung
									26.000.000		**29.137.000**		**29.073.000**		**28.841.000**		**28.962.000**		**142.013.000**		